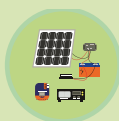


Pengembangan Model Bisnis PLTS Atap Sekolah: SMAN & SMKN, Jawa Barat

IMPLEMENTASI MODEL BISNIS SEPERTI APA YANG BISA MENJAWAB SITUASI DI JABAR?



Target kapasitas cukup besar, lebih dari 170 sekolah tersebar (bisa memasang 5 – 15 kWp PLTS atap, tiap gedung)



Pendanaan yang tersedia tidak membebani anggaran Pemerintah Provinsi terlalu besar (dapat dikelola oleh **BUMD bidang energi**)

METODOLOGI DAN TEMUAN

Model bisnis disusun pada struktur entitas pengelola, yang bisa mengefektifkan unit kerja BUMD yang ada di Jawa Barat. Pendanaan awal bagi operasional entitas pengelola tersebut dapat memanfaatkan penempatan modal tambahan, dan selanjutnya berupaya mengakses berbagai sumber pembiayaan alternatif di lingkungan Jawa Barat dan di tingkat nasional (opsi pendanaan campuran, *blended-financing*). Kemitraan kerja bisa dibangun dalam struktur entitas pengelola, juga untuk memperbaiki struktur permodalannya, misalnya *joint-venture*, atau skema kerjasama usaha serupa lainnya.

Instalasi PLTS atap sekolah diharapkan beroperasi dalam jangka panjang, bisa diatas 20 tahun misalnya, yang sangat membutuhkan kerja operasional dan pemeliharaan yang optimal untuk memastikan kinerja pembangkitan tetap tinggi, sehingga keuntungan penghematan biaya konsumsi listrik juga bisa lebih baik (untuk memperbaiki kemampuan pengembalian investasi yang wajar).



REKOMENDASI UTAMA

Rencana implementasi model bisnis perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain :



Kebutuhan penyediaan dana untuk investasi sistem PLTS atap sekolah, terkait sumber pendanaan yang tersedia dan dapat diakses entitas pengelola;



Mendorong komitmen pendanaan dari BUMD yang ada, dan optimisasi modal yang ditempatkan Pemprov untuk entitas pengelola PLTS atap sekolah;



Mengelola berbagai sumber pendanaan campuran, yang dapat mulai disusun dengan rencana kerjasama lembaga pembiayaan yang sesuai, baik di tingkat nasional maupun Jawa Barat; serta



Opsi alternatif dengan memanfaatkan peluang pendanaan tambahan dalam skema instrumen nilai ekonomi karbon (yang kedepannya selain diterapkan pada PLTU batubara juga akan diberlakukan pada entitas pelaku umum lainnya), sehingga investasi PLTS atap juga dapat berperan dalam implementasi skema tersebut.

(sebagai catatan : issue penentuan hak atas karbon yang diklaim dalam penguasaan PLN pada aplikasi PLTS perlu diatasi, misalnya revisi aturan kontrak pelanggan, PJBL / kesepakatan sejenis, seperti mengembalikan hak atas karbon pada investasi PLTS)



TAMBAHAN

Pelaporan operasional PLTS atap sekolah disusun sebagai bagian dari inventarisasi GRK dari Pemprov Jabar, antara lain :



Monitoring pencapaian target penurunan emisi GRK Jawa Barat bidang Energi, yang dapat menjamin performa / kapasitas pembangkit energi terbarukan dalam jangka Panjang (kerja teknis & kerja administrasi);



Memasukkan dalam aksi mitigasi perubahan iklim (bagian dari kewajiban provinsi pada pencapaian target NDC, Peraturan Presiden 98 / 2021) sehingga perlu dipertimbangkan perluasan cakupan kerja yang dapat dikelola dengan model bisnis PLTS atap, akselerasi peningkatan kapasitas terpasang yang menjangkau pengguna umum, masyarakat dan dunia usaha Jawa Barat;



Integrasi skema pelaporan PPRKD (perencanaan pembangunan rendah karbon daerah), serta berdampak langsung nantinya pada penerapan opsi batas atas emisi pelaku usaha dan institusi pengguna lainnya.

